



## **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lатуharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### **KETERANGAN PERS**

**Nomor: 21/HM.00/III/2023**

### **Pandangan Komnas HAM terhadap Adopsi Rekomendasi Universal Periodic Review Indonesia siklus ke-4**

Sehubungan dengan selesainya proses adopsi atas rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) Indonesia siklus ke-4 di Dewan HAM PBB di Jenewa Swiss, Komnas HAM yang telah berpartisipasi dalam proses tersebut sejak tahun lalu menyampaikan sebagai berikut:

Komnas HAM menyambut baik 269 rekomendasi yang diajukan oleh 108 negara anggota PBB sebagai bentuk kerja sama global melalui diplomasi HAM di forum internasional. Komnas HAM juga memberi apresiasi atas komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menerima 205 rekomendasi tersebut.

Dalam upaya mendorong ratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional, Komnas HAM menghargai komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan lebih lanjut ratifikasi konvensi HAM internasional yaitu Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (OPCAT); dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (CERD).

Komnas HAM juga mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan pemajuan dan perlindungan hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak pekerja migran dan hak pekerja rumah tangga; melalui perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, akses terhadap kesehatan dan hak reproduksi seksual, akses pendidikan, akses ekonomi, akses pekerjaan, dan akses politik. Lebih lanjut, Komnas HAM berharap bahwa komitmen tersebut akan dilaksanakan secara efektif di antaranya melalui agenda pembangunan nasional dan hukum nasional yang berperspektif HAM.

Berkaitan dengan lingkungan, Komnas HAM mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengurangi dampak pertambangan terhadap lingkungan, khususnya pencemaran sumber daya tanah dan air; serta melanjutkan upaya untuk mengatasi hambatan akses tanah oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.

Terkait situasi di Papua, Komnas HAM secara khusus mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua, serta segera dan secara transparan meminta pertanggungjawaban hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk merealisasikan komitmen untuk menjunjung tinggi, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia di Papua, termasuk dalam isu kebebasan berkumpul, berpendapat, berekspresi dan pers; serta hak-hak perempuan, anak dan minoritas; sekaligus memprioritaskan perlindungan warga sipil.

Terkait KUHP, Komnas HAM akan terus memantau implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, untuk memastikan komitmen pemerintah bahwa revisi KUHP dan reformasi hukum berjalan sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional.

Komnas HAM memberikan catatan bahwa rekomendasi tentang penghapusan hukuman mati belum sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang masih mengatur tentang hukuman mati. Sehubungan dengan itu, Komnas HAM mendorong Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan komitmen untuk menerapkan mekanisme peringanan hukuman bagi terpidana mati, selain mekanisme grasi. Terlebih karena KUHP yang baru telah menetapkan hukuman mati bukan lagi sebagai hukuman pokok, namun pidana yang bersifat khusus untuk pidana tertentu, dan memasukkan pengaturan masa percobaan 10 tahun untuk mengubah putusan hukuman mati.

Terkait Pembela HAM, Komnas HAM menyambut komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan dan menerapkan kebijakan komprehensif bagi perlindungan pembela HAM/perempuan pembela HAM, termasuk pembela lingkungan, aktivis dan jurnalis; dan mengadopsi kerangka hukum dan kebijakan komprehensif yang menyediakan mekanisme perlindungan preventif bagi pembela HAM.

Komnas HAM juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan komitmen untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai terhadap Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dan menyelenggarakan persidangan yang adil, kredibel, independen dan transparan atas pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

*Komnas HAM juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan komitmen dalam memerangi impunitas secara efektif dengan segera menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan yang sedang berlangsung, secara adil, kredibel, mandiri, terbuka dan transparan, termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender, dengan lebih memberikan dukungan dan memperkuat peran penyelidikan Komnas HAM.*

Komnas HAM juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memantau dan mendorong pelaksanaan dari komitmen-komitmen pemerintah terhadap rekomendasi UPR siklus ke-4 tersebut. Pada akhirnya, Komnas HAM mengapresiasi upaya dan langkah pemerintah untuk melanjutkan partisipasi dan tanggungjawabnya dalam mekanisme dan sesuai dengan standar HAM internasional, termasuk partisipasi di dalam mekanisme UPR, dan berharap agar proses semacam ini dapat memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

**Jakarta, 31 Maret 2023**

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI**

**Atnike Nova Sigiro**  
**Ketua**

Narahubung:

1. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai